

## TANTANGAN DAN PELUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL DI ERA OTONOMI DAERAH

Muhamad Ragiel Yudha Setiawan<sup>1</sup>, Agus Widiyarta<sup>2</sup>

[22041010234@student.upnjatim.ac.id](mailto:22041010234@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [aguswidiyarta.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:aguswidiyarta.adneg@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dan sosial di era otonomi daerah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, studi ini menganalisis strategi pemerintah kota dalam mengatasi keterbatasan anggaran, mengelola urbanisasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan berbagai strategi inovatif seperti kerjasama pemerintah-swasta, optimalisasi pendapatan asli daerah, dan implementasi e-Government untuk mengatasi tantangan pembangunan. Meskipun menghadapi masalah seperti urbanisasi yang pesat dan keterbatasan anggaran, Surabaya berhasil memanfaatkan peluang melalui pengembangan smart city, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penerapan teknologi dalam pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Surabaya dalam pembangunan berkelanjutan bergantung pada kemampuan pemerintah kota untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

**Kata Kunci:** Otonomi Daerah, Pembangunan Infrastruktur, Urbanisasi, Smart City.

### ABSTRACT

*This study examines the challenges and opportunities faced by the Surabaya City Government in realizing infrastructure and social development in the era of regional autonomy. Using qualitative research methods, this study analyzes the city government's strategies in overcoming budget constraints, managing urbanization, and optimizing the use of technology in governance. The results of the study show that the Surabaya City Government has implemented various innovative strategies such as public-private partnerships, optimizing local revenues, and implementing e-Government to overcome development challenges. Despite facing problems such as rapid urbanization and budget constraints, Surabaya has succeeded in utilizing opportunities through smart city development, increasing community participation, and implementing technology in public services. This study concludes that Surabaya's success in sustainable development depends on the city government's ability to continue to innovate and adapt to change, as well as increasing collaboration with various stakeholders.*

**Keywords:** Regional Autonomy, Infrastructure Development, Urbanization, Smart City.

### PENDAHULUAN

Kota Surabaya, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, di balik kemajuan tersebut, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah kota dalam upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur dan sosial yang berkelanjutan. Era otonomi daerah yang dimulai sejak reformasi tahun 1998 telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan wilayahnya. Hal ini membuka peluang bagi Kota Surabaya untuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Namun, di sisi lain, otonomi daerah juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal koordinasi dengan pemerintah pusat dan pengelolaan sumber daya yang terbatas.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya adalah keterbatasan anggaran dalam membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur skala besar. Meskipun pendapatan asli daerah (PAD) Surabaya tergolong tinggi dibandingkan kota-kota lain di Indonesia, kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sistem transportasi massal, dan fasilitas publik lainnya masih jauh melebihi kemampuan keuangan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah kota untuk mencari alternatif pendanaan, seperti kerjasama dengan pihak swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP) atau mengoptimalkan pemanfaatan dana dari pemerintah pusat. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah masalah urbanisasi yang pesat, yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan perumahan, lapangan kerja, dan layanan publik. Pemerintah Kota Surabaya dituntut untuk dapat mengelola pertumbuhan penduduk ini dengan bijak agar tidak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan di masa depan.

Di sisi lain, era otonomi daerah juga membuka peluang bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk mengembangkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Surabaya telah dikenal sebagai salah satu kota yang terdepan dalam penerapan konsep smart city di Indonesia, dengan berbagai inisiatif seperti e-government, sistem transportasi cerdas, dan pengelolaan lingkungan berbasis teknologi. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan menciptakan solusi kreatif untuk mengatasi berbagai permasalahan perkotaan. Selain itu, posisi strategis Surabaya sebagai pusat ekonomi di Indonesia bagian timur juga membuka peluang untuk menarik investasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian Pertama, bagaimana strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di era otonomi daerah? Kedua, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola urbanisasi dan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan pembangunan sosial yang berkelanjutan? Ketiga, bagaimana Pemerintah Kota Surabaya dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sosial?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif tantangan dan peluang yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dan sosial di era otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang efektif dalam mengatasi keterbatasan anggaran, mengelola urbanisasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi berbagai pihak. Bagi Pemerintah Kota Surabaya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang pembangunan perkotaan dan otonomi daerah di Indonesia, serta membuka peluang untuk penelitian lanjutan. Bagi masyarakat Surabaya, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas pembangunan kota dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Lebih luas lagi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dan sosial di era otonomi daerah.

## **METODOLOGI**

Dalam penelitian tentang Tantangan dan Peluang Pemerintah Kota Surabaya dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial di Era Otonomi Daerah, metode penelitian kualitatif menjadi pilihan yang tepat untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena tersebut secara mendalam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang kaya dan kontekstual mengenai dinamika pembangunan di Kota Surabaya. Metode ini cocok digunakan karena dapat mengungkap kompleksitas tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah kota dalam mengelola pembangunan infrastruktur dan sosial di era otonomi daerah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah kota, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi sumber utama informasi. Observasi lapangan juga dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi infrastruktur dan dinamika sosial di Kota Surabaya. Selain itu, studi dokumen terhadap kebijakan, laporan, dan data statistik terkait pembangunan kota juga menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan data. Kombinasi dari berbagai teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang situasi di lapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara induktif, di mana peneliti berusaha menemukan pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data yang terkumpul. Proses analisis melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari transkripsi data wawancara, pengkodean, kategorisasi, hingga interpretasi. Peneliti juga menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi temuan, dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian.

Dalam penyajian hasil penelitian, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan secara rinci tantangan dan peluang yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam pembangunan infrastruktur dan sosial. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang kaya, dilengkapi dengan kutipan langsung dari partisipan penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih hidup dan autentik. Peneliti juga mengintegrasikan temuan-temuan dengan teori dan konsep yang relevan untuk memberikan interpretasi yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang dinamika pembangunan di Kota Surabaya di era otonomi daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Pembangunan Infrastruktur**

Pemerintah Kota Surabaya menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur di era otonomi daerah karena keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menerapkan berbagai strategi inovatif dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Salah satu strategi utama yang ditempuh adalah dengan menggandeng pihak swasta melalui skema kerjasama pemerintah-swasta atau Public Private Partnership (PPP). Melalui skema PPP, Pemerintah Kota Surabaya dapat memanfaatkan modal dan keahlian dari sektor swasta untuk membangun infrastruktur tanpa harus sepenuhnya mengandalkan APBD. Hal ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur di Surabaya meski dengan keterbatasan anggaran pemerintah.

Selain PPP, Pemerintah Kota Surabaya juga mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Upaya ini dilakukan antara lain dengan memperbaiki sistem administrasi perpajakan, memperluas

basis pajak, dan meningkatkan pengawasan. Pemerintah Kota Surabaya juga menggali sumber-sumber PAD baru yang potensial namun belum dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan PAD ini penting untuk menambah kapasitas fiskal daerah sehingga lebih leluasa dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Dengan PAD yang lebih besar, ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat juga dapat dikurangi.

Efisiensi dan efektivitas belanja daerah juga menjadi fokus Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi keterbatasan anggaran. Pemerintah kota melakukan evaluasi dan rasionalisasi belanja untuk memangkas pos-pos yang tidak prioritas. Anggaran lebih difokuskan pada belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kota juga menerapkan e-budgeting dan e-procurement untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat meminimalisir kebocoran anggaran dan memastikan penggunaan dana yang lebih efisien.

Pemerintah Kota Surabaya juga memanfaatkan skema pembiayaan alternatif seperti obligasi daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis. Melalui penerbitan obligasi daerah, pemerintah kota dapat memperoleh dana segar dalam jumlah besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur tanpa harus mengandalkan APBD semata. Skema ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur karena dana dapat diperoleh di muka. Namun tentu penerbitan obligasi daerah ini harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam jangka panjang.

Optimalisasi aset daerah juga menjadi salah satu strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi keterbatasan anggaran. Pemerintah kota melakukan inventarisasi dan penilaian kembali aset-aset daerah yang potensial untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta atau dimanfaatkan secara komersial. Aset-aset yang idle diupayakan untuk dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah. Pemerintah kota juga melakukan penataan aset agar penggunaannya lebih efisien dan produktif. Optimalisasi aset ini penting untuk menambah sumber pendapatan daerah di luar pajak dan retribusi.

Pemerintah Kota Surabaya juga menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dan lembaga donor internasional untuk mendapatkan bantuan pendanaan pembangunan infrastruktur. Kerjasama ini dapat berupa hibah, pinjaman lunak, atau bantuan teknis untuk proyek-proyek infrastruktur strategis. Pemerintah kota secara aktif mengajukan proposal-proposal kerjasama dan pendanaan kepada kementerian/lembaga terkait maupun lembaga donor internasional. Melalui kerjasama ini, beban pendanaan infrastruktur dari APBD dapat dikurangi sehingga lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk sektor-sektor lain.

Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur melalui program-program pemberdayaan. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan infrastruktur di lingkungan mereka. Pemerintah kota menyediakan stimulan anggaran, sementara masyarakat berkontribusi dalam bentuk tenaga, material, atau dana swadaya. Model pembangunan partisipatif ini selain dapat mengurangi beban anggaran pemerintah, juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap infrastruktur yang dibangun. Hal ini pada gilirannya akan mendorong keberlanjutan infrastruktur tersebut.

Inovasi dalam desain dan teknologi infrastruktur juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Pemerintah kota menerapkan desain dan teknologi yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur. Misalnya penggunaan material daur ulang, teknologi hemat energi, atau desain multifungsi. Inovasi ini bertujuan untuk menekan biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam jangka panjang. Pemerintah kota juga mendorong riset dan pengembangan teknologi infrastruktur yang lebih efisien dan sesuai dengan kondisi lokal.

Pemerintah Kota Surabaya juga menerapkan strategi pembangunan infrastruktur berbasis prioritas dan bertahap. Pemerintah kota melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur dan menyusun skala prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah namun tetap memperhatikan keberlanjutan dan keterpaduan antar sektor. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas untuk menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pemerintah kota juga secara berkala melakukan evaluasi dan penyesuaian prioritas pembangunan infrastruktur sesuai perkembangan kebutuhan.

## **B. Tantangan dan Peluang Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengelolaan Urbanisasi**

Kota Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam mengelola urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Sebagai pusat ekonomi dan industri di Jawa Timur, Surabaya menjadi magnet bagi para pencari kerja dari berbagai daerah. Fenomena ini mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dari tahun ke tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Surabaya mencapai 2.874.314 jiwa pada tahun 2020, meningkat dari 2,77 juta jiwa pada tahun 2010. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Surabaya terus menjadi tujuan utama urbanisasi di Jawa Timur.

Tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya adalah mengendalikan arus urbanisasi yang tidak terkendali. Banyak pendatang yang masuk ke Surabaya tanpa tujuan yang jelas, tanpa keterampilan yang memadai, dan tanpa jaminan pekerjaan. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan peningkatan angka kriminalitas. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) telah menerapkan kebijakan pengetatan syarat bagi pendatang baru. Kebijakan ini mengharuskan setiap pendatang memiliki tujuan yang jelas, seperti pekerjaan yang pasti atau alasan pendidikan.

Pemerintah Kota Surabaya juga menghadapi tantangan dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang memadai bagi penduduk yang terus bertambah. Peningkatan jumlah penduduk berarti meningkatnya kebutuhan akan perumahan, transportasi, air bersih, listrik, dan fasilitas kesehatan. Pemerintah kota harus mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Hal ini membutuhkan perencanaan yang matang dan alokasi anggaran yang tepat. Tantangan ini semakin kompleks mengingat keterbatasan lahan yang tersedia di Surabaya.

Kepadatan penduduk yang tinggi juga menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Peningkatan jumlah penduduk berarti peningkatan produksi sampah, polusi udara, dan penggunaan sumber daya alam. Pemerintah Kota Surabaya dituntut untuk menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang efektif untuk menjaga kualitas hidup penduduknya. Ini termasuk pengelolaan sampah yang efisien, pengendalian polusi, dan peningkatan ruang terbuka hijau di kota.

Tantangan lain yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Meskipun Surabaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih ada kesenjangan ekonomi yang signifikan di antara penduduknya. Pemerintah kota harus mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk memberikan pelatihan keterampilan bagi penduduk lokal dan pendatang untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

Di sisi lain, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk juga membawa peluang bagi Surabaya. Peningkatan jumlah penduduk berarti peningkatan sumber daya manusia yang dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Surabaya memiliki kesempatan untuk

memanfaatkan keragaman talenta dan ide yang dibawa oleh para pendatang. Hal ini dapat menjadi modal bagi pengembangan industri kreatif dan teknologi di kota ini. Pemerintah kota dapat mendorong terciptanya ekosistem yang mendukung pertumbuhan startup dan industri berbasis pengetahuan.

Urbanisasi juga membawa peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Dengan konsentrasi penduduk yang lebih tinggi, pemerintah kota dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Ini dapat mencakup pengembangan sistem transportasi massal yang lebih efisien, penerapan teknologi smart city untuk meningkatkan kualitas layanan publik, dan pengembangan sistem pengelolaan air dan energi yang lebih berkelanjutan.

Pertumbuhan penduduk juga dapat menjadi pendorong bagi perkembangan sektor pendidikan di Surabaya. Meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah menciptakan permintaan yang lebih besar akan lembaga pendidikan berkualitas. Ini memberi peluang bagi Surabaya untuk mengembangkan diri sebagai kota pendidikan terkemuka di Indonesia. Pemerintah kota dapat mendorong investasi dalam sektor pendidikan, baik dari pihak swasta maupun pemerintah, untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Surabaya juga memiliki peluang untuk menjadi model kota berkelanjutan di Indonesia. Dengan menerapkan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, Surabaya dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring. Ini dapat mencakup pengembangan energi terbarukan, penerapan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, dan peningkatan efisiensi energi dalam bangunan dan transportasi.

Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Dengan populasi yang beragam, Surabaya dapat memanfaatkan kearifan lokal dan ide-ide inovatif dari warganya untuk mengatasi tantangan perkotaan. Pemerintah kota dapat mengembangkan platform partisipasi publik yang memungkinkan warga untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kota. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan rasa memiliki warga terhadap kota, tetapi juga dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Urbanisasi juga memberi peluang bagi Surabaya untuk memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi regional. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan keragaman talenta, Surabaya dapat menarik lebih banyak investasi dan perusahaan multinasional. Ini dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas tinggi dan meningkatkan daya saing ekonomi kota. Pemerintah kota dapat fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan seperti industri maritim, teknologi informasi, dan industri kreatif untuk memanfaatkan peluang ini.

Pertumbuhan penduduk juga memberi peluang bagi pengembangan budaya dan pariwisata di Surabaya. Keragaman budaya yang dibawa oleh para pendatang dapat memperkaya lanskap budaya kota. Pemerintah kota dapat memanfaatkan hal ini untuk mengembangkan atraksi wisata baru dan mempromosikan Surabaya sebagai destinasi wisata budaya. Ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, tetapi juga akan memperkuat identitas kota dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, Pemerintah Kota Surabaya perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Ini mencakup perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemerintah kota juga perlu meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan yang tepat, Surabaya dapat menjadi model kota yang berhasil mengelola

urbanisasi dan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Keberhasilan Surabaya dalam mengelola urbanisasi dan pertumbuhan penduduk akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah kota untuk beradaptasi dengan perubahan dan berinovasi. Pemerintah kota perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan dan program yang ada untuk memastikan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan yang dinamis. Dengan komitmen yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan warga, Surabaya memiliki potensi untuk menjadi contoh keberhasilan pengelolaan perkotaan di Indonesia dan bahkan di tingkat global.

### **C. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi**

Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini terlihat dari berbagai inisiatif e-Government yang telah diterapkan, seperti sistem pengelolaan keuangan daerah, kesehatan, sumber daya manusia, perizinan, dan pendidikan. Implementasi e-Government ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi praktik korupsi dalam birokrasi. Dengan adanya sistem digital ini, warga Surabaya dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan pemerintah secara online, mulai dari pendaftaran hingga penerimaan hasil layanan.

Salah satu inovasi utama yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya adalah pengembangan aplikasi Sayang Warga, yang berfungsi sebagai SupperApp untuk mengumpulkan dan mengelola data seluruh warga kota. Aplikasi ini digunakan oleh 38.000 Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk melakukan pendataan di lingkungan perkampungan. Melalui aplikasi ini, pemerintah dapat memperoleh informasi detail tentang kondisi masyarakat, seperti jumlah pengangguran, kasus stunting, kehamilan, dan kebutuhan khusus warga. Data yang terkumpul menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan memberikan intervensi yang tepat sasaran.

Pemkot Surabaya juga telah mengimplementasikan sistem Smart Governance sebagai landasan utama konsep Smart City. Smart Governance mencakup tiga aspek utama, yaitu kebijakan publik, tata kelola birokrasi, dan layanan publik. Untuk mendukung layanan kepada masyarakat, berbagai aplikasi telah dikembangkan, termasuk Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Sipaku). Sistem ini dirancang untuk mempermudah akses layanan administrasi bagi warga, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien dan transparan.

Dalam upaya meningkatkan keamanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Pemkot Surabaya telah memperkenalkan Command Center Sistem Siaga Bencana. Sistem ini dilengkapi dengan lebih dari 2.000 CCTV yang tersebar di seluruh kota untuk memantau situasi secara real-time. Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat dengan cepat merespon berbagai kejadian atau situasi darurat yang terjadi di kota. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan warga, tetapi juga membantu dalam pengelolaan lalu lintas dan infrastruktur kota secara lebih efektif.

Inovasi teknologi juga diterapkan dalam pengelolaan infrastruktur kota. Pemkot Surabaya telah mengembangkan sistem drainase di 12 lokasi pompa dan membangun saluran U-ditch di 547 lokasi untuk mengatasi masalah banjir dan genangan air. Selain itu, pembangunan Tunnel yang menghubungkan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) juga sedang dilakukan untuk mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Proyek-proyek infrastruktur ini dikelola dengan bantuan teknologi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

Dalam bidang kesehatan, Pemkot Surabaya sedang membangun RSUD Surabaya Timur yang ditargetkan selesai pada September 2024. Pembangunan rumah sakit ini

merupakan bagian dari upaya pemerataan layanan kesehatan di Kota Surabaya. Selain itu, pemerintah juga telah mengembangkan aplikasi e-Health yang memungkinkan warga untuk mengakses layanan kesehatan secara online. Sistem ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, tetapi juga membantu pemerintah dalam mengelola data kesehatan warga secara lebih efektif.

Pemkot Surabaya juga telah menerapkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam mengintegrasikan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi. Penggunaan AI ini telah membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis data (data-driven policy), yang berdampak signifikan pada berbagai prioritas pembangunan. Hasilnya terlihat dari keberhasilan Surabaya dalam menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan prevalensi stunting secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mendukung transparansi dan partisipasi publik, Pemkot Surabaya sedang mengembangkan sistem open data yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai data pemerintahan. Sistem ini diharapkan dapat memperkuat posisi Surabaya sebagai smart city dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, penggunaan satu peta berbasis geospasial juga diterapkan untuk menunjang berbagai program pembangunan kota.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemkot Surabaya telah mengembangkan aplikasi e-Education untuk sektor pendidikan. Aplikasi ini memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses materi pembelajaran, melakukan ujian online, dan berinteraksi dalam platform digital. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses belajar-mengajar, tetapi juga mempersiapkan generasi muda Surabaya untuk menghadapi era digital. Untuk mendukung sektor ekonomi, Pemkot Surabaya telah mengembangkan aplikasi e-UMKM yang membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menjalankan bisnis mereka. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti pemasaran digital, akses ke pembiayaan, dan pelatihan kewirausahaan. Dengan adanya aplikasi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing UMKM lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota. Dalam hal transportasi publik, Pemkot Surabaya telah mengembangkan sistem Suroboyo Bus yang terintegrasi dengan aplikasi mobile. Sistem ini memungkinkan warga untuk melacak posisi bus secara real-time, merencanakan perjalanan, dan bahkan membayar tiket secara digital. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transportasi publik, tetapi juga mendorong penggunaan transportasi massal yang lebih ramah lingkungan.

Untuk mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik, Pemkot Surabaya telah menerapkan sistem e-Budgeting. Sistem ini memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemkot Surabaya juga telah mengembangkan sistem e-Surat untuk mempermudah administrasi perkantoran. Sistem ini memungkinkan pengelolaan dokumen secara digital, mulai dari pembuatan, pengiriman, hingga pengarsipan surat. Implementasi e-Surat tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mendukung upaya penghematan penggunaan kertas (paperless office).

Dalam upaya meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan kota, Pemkot Surabaya telah mengembangkan aplikasi pengaduan masyarakat. Melalui aplikasi ini, warga dapat dengan mudah melaporkan berbagai masalah atau memberikan saran untuk perbaikan kota. Sistem ini tidak hanya meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan warga, tetapi juga mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam membangun kota. Keberhasilan Surabaya dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan telah diakui secara nasional. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya predikat SAKIP AA, yang pertama kali diraih oleh sebuah kota di

Indonesia. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Surabaya telah berhasil mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja dengan baik. Ke depannya, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi yang optimal.

## **KESIMPULAN**

Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur dan sosial di era otonomi daerah. Melalui berbagai strategi inovatif seperti kerjasama pemerintah-swasta (PPP), optimalisasi pendapatan asli daerah, efisiensi belanja, dan pemanfaatan skema pembiayaan alternatif, Surabaya berhasil mengatasi keterbatasan anggaran untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis. Dalam mengelola urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, pemerintah kota telah menerapkan kebijakan pengetatan syarat bagi pendatang baru dan fokus pada penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang memadai. Surabaya juga telah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, seperti implementasi e-Government, pengembangan aplikasi Sayang Warga, dan penerapan sistem Smart Governance. Keberhasilan ini tercermin dari diraihnya predikat SAKIP AA, yang menunjukkan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang baik.

Meskipun demikian, Surabaya masih menghadapi tantangan yang kompleks dalam pembangunan berkelanjutan. Kepadatan penduduk yang tinggi menimbulkan masalah lingkungan yang serius, seperti peningkatan produksi sampah dan polusi udara. Kesenjangan ekonomi di antara penduduk juga masih menjadi isu yang perlu ditangani. Oleh karena itu, pemerintah kota perlu terus meningkatkan upaya dalam pengelolaan lingkungan yang efektif, pemerataan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Pemanfaatan teknologi dan inovasi perlu diperluas tidak hanya dalam aspek pelayanan publik, tetapi juga dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kota. Pengembangan ekosistem yang mendukung pertumbuhan startup dan industri berbasis pengetahuan juga perlu diprioritaskan untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang beragam.

Untuk ke depannya, disarankan agar Pemerintah Kota Surabaya terus mengembangkan pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perkotaan. Kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, perlu ditingkatkan untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif dan inovatif. Pemerintah kota juga perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan serta program yang ada untuk memastikan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan yang dinamis. Fokus pada pengembangan kota yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal harus tetap menjadi prioritas. Dengan komitmen yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan warga, Surabaya memiliki potensi untuk menjadi model keberhasilan pengelolaan perkotaan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afianto. (2022). Analisis Potensial dan Peluang Pengembangan Wilayah dalam Kerangka Pembentukan Daerah Otonomi Baru. *MARS: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 1(2), 27-40.
- Amalia, D., Nesya, N., & Tyрта, M. (2023). *MINISTRATE Implementasi Kota Pintar (Smart City) Di Kota Surabaya*. In *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* (Vol. 5, Issue 1).
- Amaliyah, R., & Trifita, A. (2019). Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu*

- Sosial, 1(12), 313-317.
- Asmono, A., & Prasetyo, H. (2023). Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Kerja Sama Sister City (Studi Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya Dengan Kota Kitakyushu Jepang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 1-15.
- Efendi, A. (2022). Relasi Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Korporasi Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Luar Barat. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Febrianti, I. (2022). Relasi Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Korporasi Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Luar Barat. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Isnaeni, N. (2013). Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Global & Strategis*, 7(1), 123-138.
- Jean Manurung, G., Aswad, J., Xsandrawitz Suharmin, K., Permata Indah, D., & Darmawan, I. (2024). Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan di Daerah Surabaya. 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12741399>
- Nasir, M. (2019). Peran BUMD dalam Meningkatkan PAD Surabaya (Studi Kasus Kebun Binatang Surabaya). *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 15(3), 214-225.
- Nisyak, I. Q., Handoyo, P., & Harianto, S. (2023). Kesenjangan Sosial Masyarakat Urban di Balik Pembangunan Infrastruktur Kota (Studi di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya). *Sosio E-Kons*, 15(2), 206. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i2.17769>
- Perdana, K. (2019). Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 22(1), 77-88.
- Qatrunnada, D., Utomo, R., & Putri, S. (2022). INOVASI SISTEM DIGITAL PADA TATA KELOLA KOTA SURABAYA DALAM MENCAPAI PERTUMBUHAN KOTA GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Pengembangan Kota*, 10(2), 189-199. <https://doi.org/10.14710/jpk.10.2.189-199>
- Rismaharini, T. (2008). Pengembangan Infrastruktur Kota Surabaya, Antara Problem dan Solusi. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah*, 17-26.
- Saniyyah, N. Z. (2019). Pembangunan Infrastruktur Jalan Pemkot Surabaya Masa Soenarto Soemoprawiro Tahun 1994-2000. *AVATARA*, 7(1), 1-15.
- Septian, E., & Kriswibowo, A. (2024). Faktor Sukses E-Government dalam Pelayanan Perizinan Melalui Surabaya Single Window (SSW) Alfa di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(2). <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya177>
- Sonhaji, A. (2017). Tantangan dan Peluang Pembangunan Infrastruktur di Surabaya. *Antara Jatim*.
- Susiana, S. (2015). Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan di Daerah Surabaya. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 1(12), 313-317.
- Syarifuddin, D. (2024). Isu Strategis Tantangan Pembangunan Infrastruktur Nasional dan Daerah. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 222-235.
- Trifita, A., & Amaliyah, R. (2020). Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). In *Global & Policy* (Vol. 8, Issue 2). Edisi Khusus IROFONIC. [www.unhabitat.org](http://www.unhabitat.org)
- Wibowo, I. F. (2020). Penuntasan JLLB Surabaya Terus Dikebut. *Berita Jatim*.
- Yasa, I. W. (2016). Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 1-15.